



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025
#KPP2025

LAPORAN KINERJA

**Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Triwulan III Tahun 2025**



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 17 Oktober 2025
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tinggal Hermawan, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	4
1.5. Kendala dan Permasalahan	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Sasaran Kegiatan	10
2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025	11
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	14
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2. Analisis Capaian Kinerja	16
SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16
IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB	16
IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	18
IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	20
IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM	21
IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	22
IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	24

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	25
IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	28
IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	29
IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	30
IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	32
IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran	33
IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	34
IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	36
IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	37
IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	39
IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	40
IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	42
IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	43
IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	44
IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	45
3.3. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	48
4.1. Kesimpulan	48
4.2. Rekomendasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2025	14
Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB	17
Tabel 3. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	19
Tabel 4. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	20
Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan SDM.....	22
Tabel 6. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya.....	23
Tabel 7. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti... ..	25
Tabel 8. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya	27
Tabel 9. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	29
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya.....	30
Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	31
Tabel 12. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	32
Tabel 13. Capaian Persentase Layanan Perkantoran.....	34
Tabel 14. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya.....	36
Tabel 15. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	37
Tabel 16. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya.....	38
Tabel 17. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya ...	39
Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	41
Tabel 19. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya	42

Tabel 20. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	44
Tabel 21. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya.....	45
Tabel 22. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya	4
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	4
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	6
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum.....	7
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025.....	11
Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Triwulan II Tahun 2025	13
Gambar 8. Perbandingan Capaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP	35
Gambar 9. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2025	47
Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan 1 Tahun 2024	47

LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja (PK) Awal Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu Juli sampai September Tahun 2025 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama triwulan III tahun 2025.

Pada periode triwulan III tahun 2025, capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya cukup baik yakni sebesar 118,40 dan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode triwulan III tahun 2025.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Dari 21 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan telah mencapai target yang telah ditentukan pada Periode Triwulan III Tahun 2025, yaitu :

- 1) Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti, dengan target triwulan III tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 70 (persen), dengan capaian pada triwulan III 2025 sebesar 125 (persen) dari target triwulan III dan persentase capaian senilai 131,58% pada triwulan III;
- 2) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan III tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85 (persen), dengan capaian pada triwulan III 2025 sebesar 97,91 (persen) dari target triwulan III dan persentase capaian senilai 115,19% pada triwulan III;
- 3) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya, dengan target triwulan III tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 76 (persen), dengan capaian pada triwulan III 2025 sebesar 100 (persen) dari target triwulan III dan persentase capaian senilai 131,58% pada triwulan III;

Sementara itu, sebanyak 18 Indikator Kinerja lainnya akan dihitung pada akhir tahun karena pada Periode triwulan III Tahun 2025 tidak ada target untuk pencapaiannya.

Terlihat dari capaian kinerja triwulan III, terjadi peningkatan kinerja dari beberapa indikator yang menandakan kemajuan positif dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditandai dengan tercapaian target indikator kinerja pada triwulan III tahun 2025. Diharapkan pada Indikator Kinerja yang belum dapat dihitung

maupun yang sudah dilakukan perhitungannya pada triwulan III ini agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan kerja lebih baik untuk dapat mengoptimalkan pencapaian pada sasaran kegiatan. Dengan demikian, diharapkan pada periode triwulan selanjutnya dapat mencapai atau bahkan melebihi target kinerja yang sudah ditetapkan menjadi lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

3. Fungsi

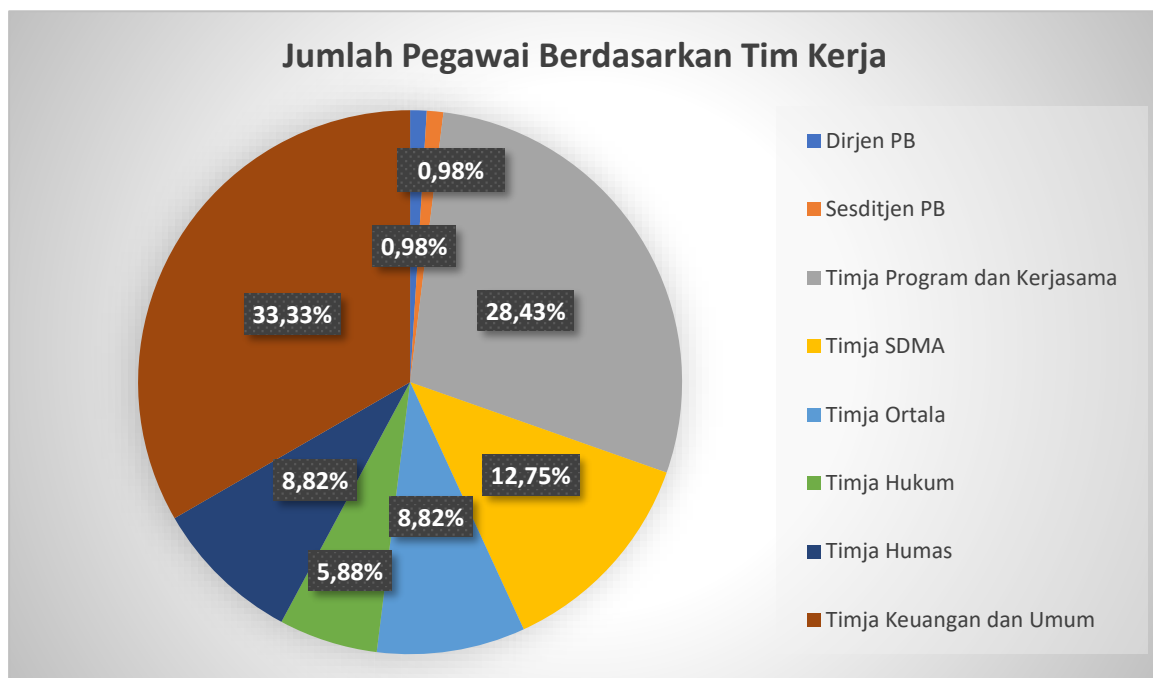
Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

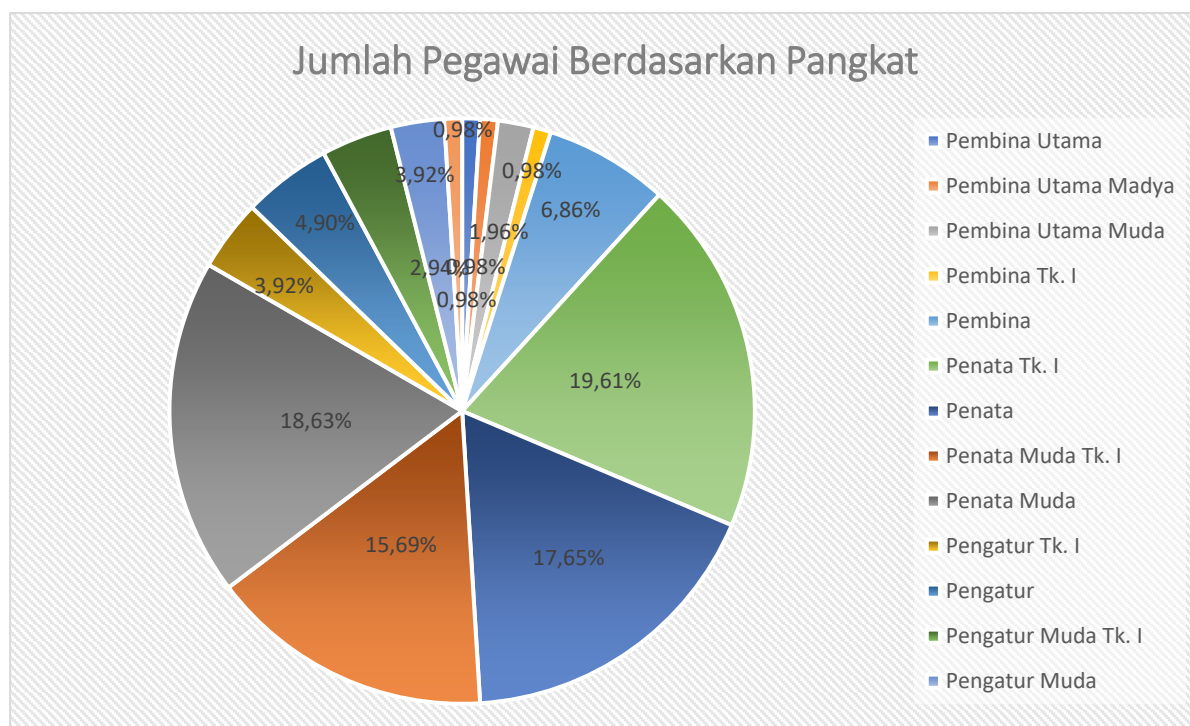
Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 berjumlah 102 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 100 orang pegawai tersebar pada 6 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program dan Kerjasama berjumlah 29 orang; (ii) Tim Kerja SDM Aparatur berjumlah 13 orang; (iii) Tim Kerja Tata Laksana berjumlah 9 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 6 orang; (v) Tim Kerja Hubungan Masyarakat berjumlah 9 orang; dan (vi) Tim Kerja Keuangan, BMN dan Umum berjumlah 34 orang.



Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

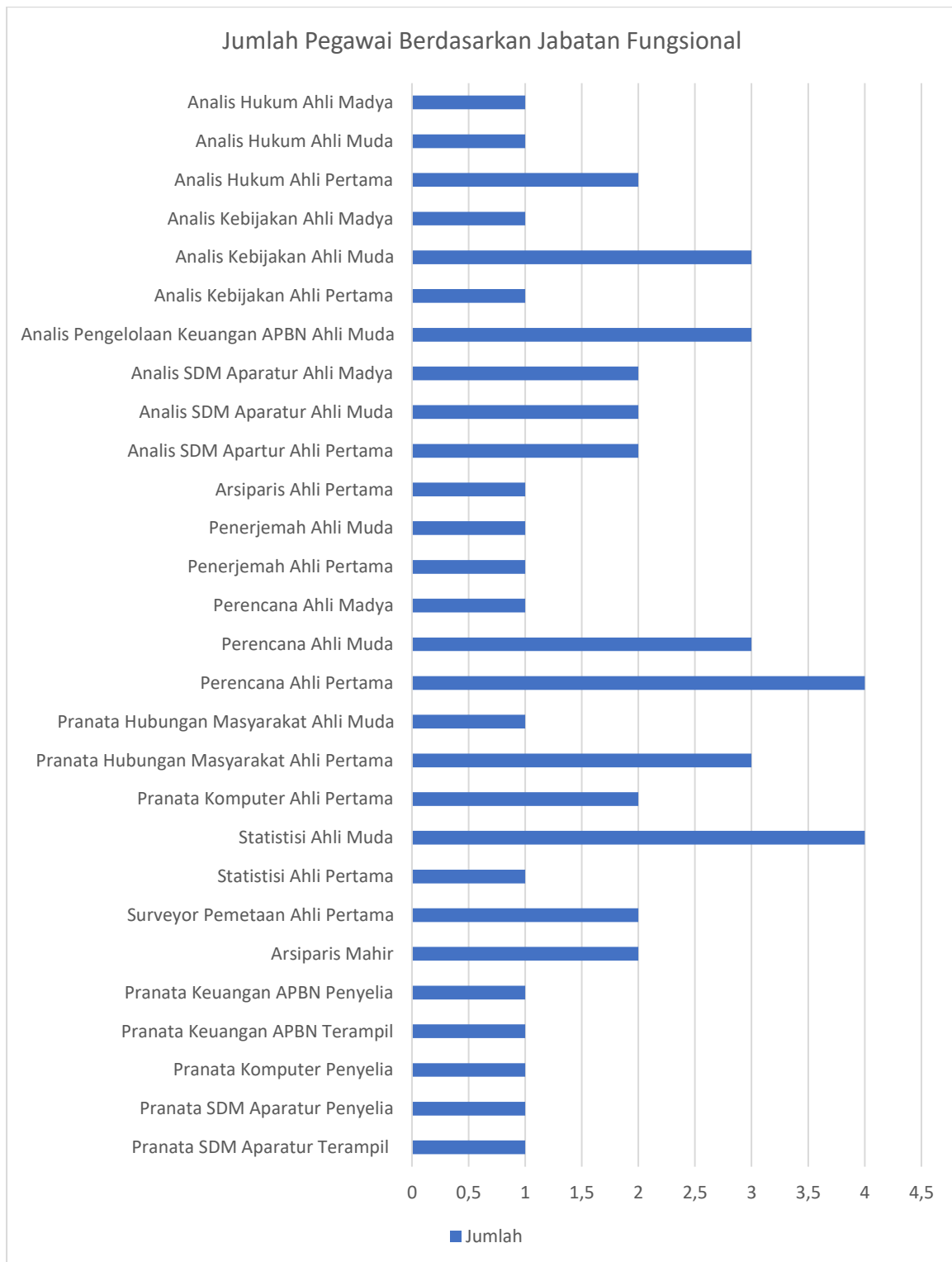
Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama (IV/e) berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 1 orang; (iii) Pembina Utama Muda (IV/c) berjumlah 2 orang; (iv) Pembina Tk. I (IV/b) berjumlah 1 orang; (v) Pembina (IV/a) berjumlah 7 orang; (vi) Penata Tk. I (III/d) berjumlah 20 orang; (vii) Penata (III/c) berjumlah 18 orang; (viii) Penata Muda Tk. I (III/b) berjumlah 16 orang; (ix) Penata Muda (III/a) berjumlah 19 orang; (x) Pengatur Tk. I (II/d) berjumlah 4 orang; (xi) Pengatur (II/c) berjumlah 5 orang;

(xii) Pengatur Muda Tk. I (II/b) berjumlah 4 orang; (xiii) Pengatur Muda (II/a) berjumlah 3 orang; dan (xiv) Juru (I/c) berjumlah 1 orang.



Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

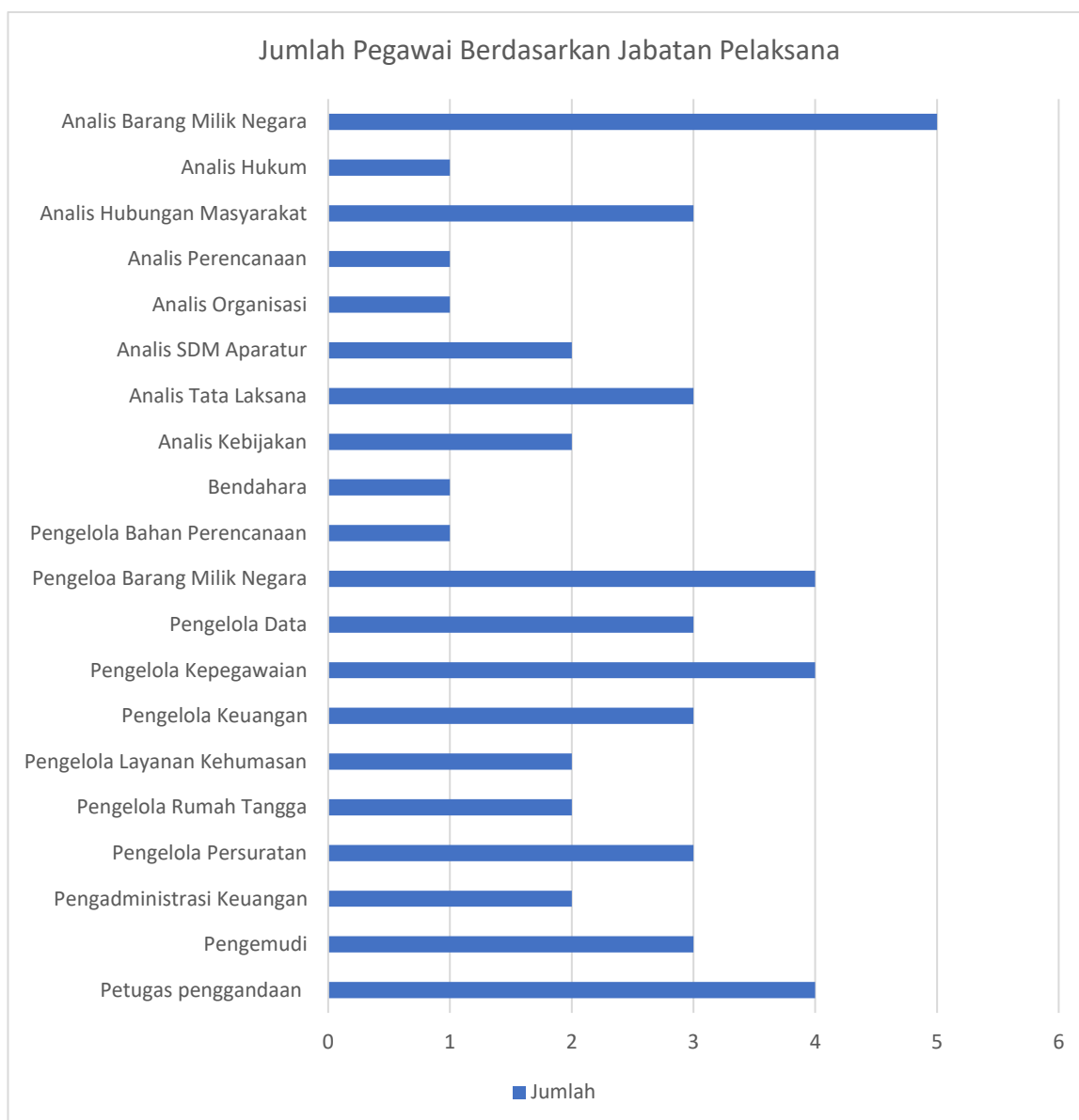
Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 49 orang yang terdiri dari Analis Hukum Ahli Madya (1 orang), Analis Hukum Ahli Muda (1 orang), Analis Hukum Ahli Pertama (2 orang), Analis Kebijakan Ahli Madya (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (3 orang), Analis Kebijakan Ahli Pertama (1 orang), Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (3 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Madya (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Muda (2 orang), Analis SDM Aparatur Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Ahli Pertama (1 orang), Penerjemah Ahli Muda (1 orang), Penerjemah Ahli Pertama (1 orang), Perencana Ahli Madya (1 orang), Perencana Ahli Muda (3 orang), Perencana Ahli Pertama (4 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (1 orang), Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (3 orang), Pranata Komputer Ahli Pertama (2 orang), Statistisi Ahli Muda (4 orang), Statistisi Ahli Pertama (1 orang) Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (2 orang), Arsiparis Mahir (2 orang) Pranata Keuangan APBN Penyelia (1 orang), Pranata Keuangan APBN Terampil (1 orang), Pranata Komputer Penyelia (1 orang), Pranata SDM Aparatur Penyelia (1 orang), Pranata SDM Aparatur Terampil (1 orang).



Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

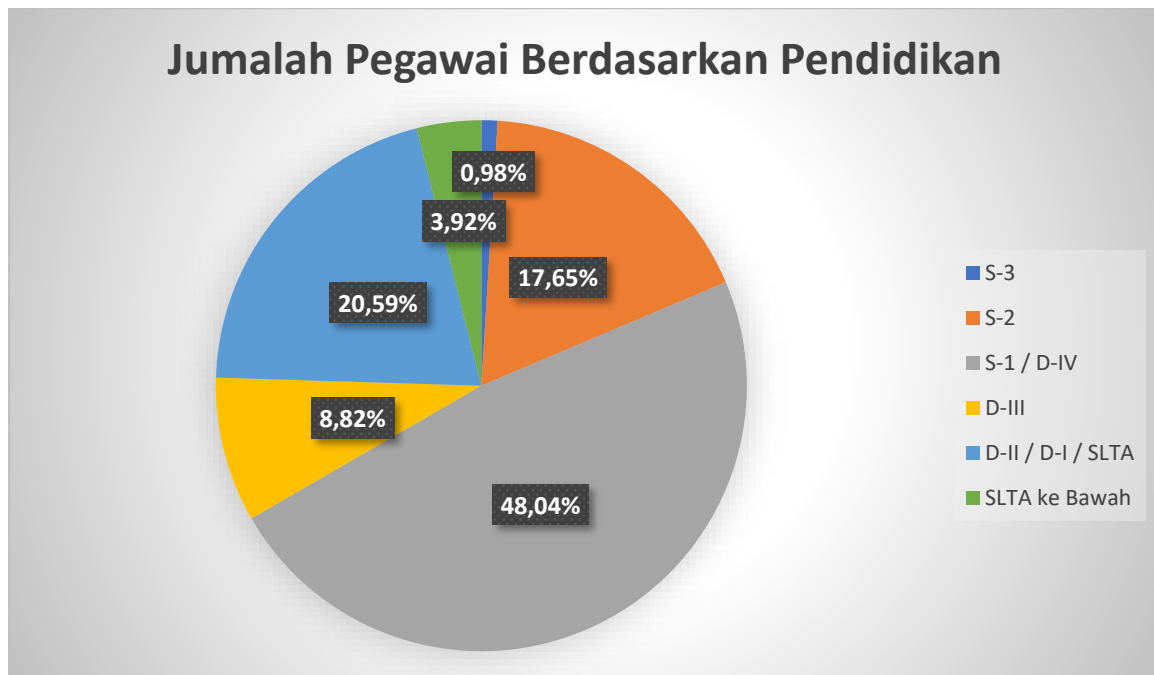
Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 50 orang, terdiri dari Analisis Kebijakan (2 orang), Analisis Perencanaan (1 orang), Pengelola Bahan Perencanaan (1 orang), Pengolah Data (3 orang), Analisis SDM Aparatur (2 orang), Pengelola Kepegawaian (4 orang), Analisis Tata laksana (3 orang), Analisis Organisasi (1 orang), Analisis Hukum (1 orang), Petugas Penggandaan (4 orang), Analisis Humas (3 orang), Pengelola Layanan Kehumasan (2 orang), Bendahara (1 orang), Pengelola Keuangan (3 orang), Pengadministrasi Keuangan (2 orang), Analisis BMN (5

orang), Pengelola BMN (4 orang), Pengelola Persuratan (3 orang), Pengelola Rumah Tangga (2 orang), dan Pengemudi (3 orang).



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum (Pelaksana)

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 1 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 18 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 49 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 9 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 21 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 4 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budi daya, yang secara umum meliputi kurang patuhnya pada beberapa pegawai dalam pengisian SKP sesuai waktu yang ditetapkan dan masih terdapat unit kerja yang belum memahami proses konversi SKP ke dalam PAK;
2. Dalam hal umum meliputi dokumen data dukung tindak lanjut atas temuan-temuan hasil pemeriksaan masih terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK; dan
3. Dalam hal tingkat kepatuhan pengelolaan data DJPB yang meliputi terbatasnya anggaran dan percepatan pendataan KUSUKA karena luasnya wilayah dalam pengumpulan data.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan;
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Sasaran/Indikator Kinerja, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja;
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan;
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang; dan
5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2025.

Sasaran Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 hasil revisi dapat dilihat pada gambar berikut ini, sedangkan Perjanjian Kinerja Awal dapat dilihat pada lampiran I.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tinggal Hermawan**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Tinggal Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84
	2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85
	3. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5
	4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	81
	5. Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,5
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5
	9. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81
	10. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	75
	11. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	12. Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
	13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76
	14. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65
	15. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	16. Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)	95
	17. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)	77
	18. Indeks Pengelolaan SDM (Indeks)	3
	19. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)	≥86
	20. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80
	21. Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

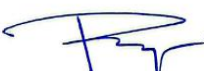

Tinggal Hermawan

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	526.244.516.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025		526.244.516.000

Jakarta, 08 April 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya


Tinggal Hermawan

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

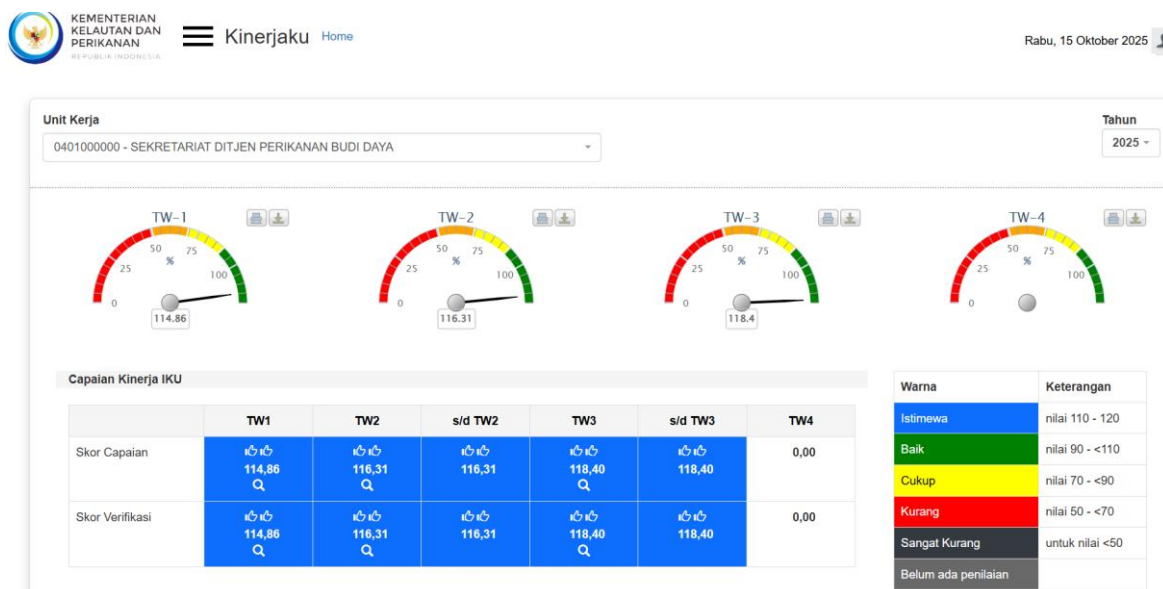
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kinerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) *Valid*, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*,

meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard* (BSC) yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau serta biru (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 7. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB Triwulan III Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 118,40 dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 82.989.372.000,- dan telah terealisasi Rp. 17.657.401.574,- atau sebesar 21,28% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Triwulan III Tahun 2025.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	(%)
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1	Nilai SAKIP DJPB	84			
		2	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya	81			
		3	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional	77			
		4	Indeks Pengelolaan SDM	3			
		5	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya	100			
		6	Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	95	70	125	131,58
		7	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan	≥86			

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	(%)
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya		tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
	8	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya	<0,5			
	9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	92			
	10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya	81,5			
	11	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya	80			
	12	Persentase Layanan Perkantoran	80			
	13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya	85	85	94,91	115,19
	14	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya	3,5			
	15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya	81			
	16	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya	76			
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya	75			
	18	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada	76	76	100	131,56

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	TARGET TRIWULAN III	CAPAIAN TRIWULAN III	(%)
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya				
	19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya	65			
	20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya	77			
	21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	≥80			

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik merupakan terlaksananya suatu sistem pemerintah dalam mendukung kegiatan yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu terlaksananya kinerja organisasi yang meningkat dan berkembang.

IKSK.1 Nilai SAKIP DJPB

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, pelaporan kinerja, dan revidasi dan evaluasi kinerja. Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 84 (nilai). Dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L pada kegiatan, yaitu Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 46,65% dari anggaran sebesar Rp. 370.175.000,- senilai Rp.180.073.300,-.

Tabel 2. Capaian Nilai SAKIP DJPB

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	84,30	84				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai SAKIP DJPB									
		Realisasi 2018-2024						2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III	
-	-	-	-	-	59,05	84,30	84				

Selama triwulan III, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu telah melakukan :

1. Evaluasi Kinerja “monitoring dan evaluasi kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya” pada tanggal 12 September 2025;
2. Pendampingan SAKIP di UPT Situbondo, Lampung dan Jepara;
3. Menyusun evaluasi rencana aksi dan Laporan Kinerja DJPB dan Sekretariat DJPB; dan
4. Input Capaian Kinerja DJPB dan Sekretariat DJPB dan Verifikasi Capaian Kinerja satker Pusat dan UPT pada aplikasi Kinerjaku Triwulan II 2025.

Sedangkan kendala yang terjadi pada periode ini adalah masih terdapat dokumen Matriks Peran Hasil yang belum sesuai/SMART pada beberapa satker UPT dan jaringan yang tidak stabil serta penginputan secara serentak pada semua eselon I yang mengakibatkan :

- a. Pada saat penginputan capaian kinerja, data dukung yang dilampirkan terkadang tidak tersimpan,
- b. Pada saat verifikasi capaian kinerja, butuh waktu yang lama untuk bisa masuk ke dalam aplikasi pengukuran verifikasi capaian kinerja dan apabila sudah diinput terkadang data yang sudah diinput tidak tersimpan.

Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Nilai AKIP di Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan pengelolaan kinerja dari sisi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi;
2. Meningkatkan peran serta UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dalam pengelolaan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Melakukan pelaporan tepat waktu, dan melakukan reviu terhadap target maupun capaian yang tercapai ataupun tidak;
4. Penyelarasan data dan informasi terkait dengan target atau capaian pada aplikasi kinerjaku dengan Renstra ataupun Renja sehingga dapat memberikan informasi yang lebih valid; dan
5. Implementasi dari rencana aksi terhadap target-target yang tidak tercapai.

IKSK.2 Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 4190/BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu:

1. Dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	DIII	25	25	25	20	10	10
			SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	S2	25	20	10	10	10	10
			SLTA	25	25	25	25	20	10

2. Indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri atas bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal and nonklasikal, sehingga pengukuran dimensi kompetensi berubah menjadi:

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester dengan target pada semester I tahun 2025 yaitu 74 , sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (indeks).

Tabel 3. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	84,33	81				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
		74,7	85,8	84,41	81	85	81			

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU ini selama periode triwulan III tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan kode Etik dan Disiplin ASN pada Bulan Agustus 2025 di BPBAT Mandiangin dan Bulan September 2025 di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan

2. Penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan II-2025 melalui aplikasi e-kinerja BKN (Bulan Juli 2025).

Permasalahan dalam pencapaian IKU ini adalah masih terdapat unit kerja yang belum memahami proses konversi SKP ke dalam PAK, sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan penilaian kinerja individu untuk Periode Triwulan IV 2025.

IKSK.3 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Bud Daya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Analis Akuakultur, (2) Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Teknisi Akuakultur, dan (4) Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi Jabatan Fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam Upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (indeks). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 75,44% dari anggaran sebesar Rp.170.108.000,- senilai Rp.128.326.260,-.

Tabel 4. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	92,31	77				

Sasaran Strategis	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional									
Realisasi 2018-2024							2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
					85,80	92,31	77			

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang telah dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 ini yaitu:

1. Telah dilakukan usul pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional pembinaan DJPB lingkup DJPB;
2. Telah dilakukan pelantikan dalam jabatan fungsional pembinaan DJPB lingkup DJPB pada Bulan Juli sejumlah 4 orang;
3. Telah disampaikan hasil uji kompetensi jabatan fungsional pembinaan DJPB pada Bulan September 2025; dan
4. Telah disusun draft Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang ruang lingkup dan standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional bidang Perikanan Budi Daya.

Untuk periode triwulan II ini tidak ada kendala yang dihadapi dalam indikator kinerja Indeks Pengelola Jabatan Fungsional.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu membuat usulan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dan kenaikan jabatan fungsional pembinaan DJPB lingkup DJPB, bagi yang dinyatakan lulus uji kompetensi.

IKSK.4 Indeks Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu : (1) penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), (2) proses pengembangan kompetensi ASN, (3) proses mutasi yang terdiri dari proses pengangkatan CASN, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (4) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan, rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpun ASN, dan (5) informasi ASN, yang terdiri dari : peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator

kegiatan ini adalah 3 (indeks). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 38,65% dari anggaran sebesar Rp.1.259.476.000,- senilai Rp.486.827.869,-.

Tabel 5. Capaian Indeks Pengelolaan SDM

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	6	3				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
					6	6	3			

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 yaitu proses pencantuman gelar (pada bulan Juli s.d. September 2025), proses kenaikan pangkat (pada bulan Agustus 2025), proses layanan peremajaan data ASN (pada bulan Juli s.d. September 2025), dan proses layanan pemberhentian ASN (pada bulan Juli s.d. September 2025).

Untuk periode ini, tidak terdapat kendala pada indikator kinerja Indeks Pengelolaan SDM.

Ada beberapa rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi melalui tugas belajar; dan
2. Melakukan pengelolaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan *time-line* yang telah ditetapkan oleh BKN.

IKSK.5 Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan

Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yaitu:

1. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan
2. Perubahan atas Rancangan Peraturan Menteri KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan setiap semesteran, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 28,71% dari anggaran sebesar Rp.381.306.000,- senilai Rp.109.456.400,-.

Tabel 6. Capaian Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	100	100				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
87,50	108,33	70	100	100	100	100	100			

Telah dilakukan Konsultasi Publik mengenai Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia, di Surabaya, Tanggal 3 Juli 2025 dan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara ke dalam Wilayah Republik Indonesia, di Semarang, tanggal 24 September 2025 pada periode triwulan III tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada periode triwulan III yaitu kurangnya partisipasi peserta konsultasi publik dalam memberikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Menteri.

Untuk triwulan selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu mengidentifikasi pihak terkait yang terdampak peraturan perundang-undangan dan berpotensi mempunyai pandangan yang berbeda serta pemanfaatan aplikasi komunikasi berbasis daring.

IKSK.6 Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Dokumen/naskah kerja sama adalah surat perjanjian tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang akan bekerja sama. Dokumen ini bisa berupa Perjanjian Kerja Sama, Nota Kesepakatan, atau Memorandum of Understanding (MoU). Adapun fungsi dari dokumen/naskah kerja sama adalah (i) untuk menjaga keamanan dan ketenangan semua pihak yang terlibat; (ii) menjamin hak dan kewajiban semua pihak; (iii) mengurangi resiko perselisihan; (iv) menjadi acuan penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan; dan (iv) menjadi bukti konkret untuk pengadilan hukum.

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Bud Daya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budi daya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Nilai Indikator capaian dari presentase dokumen/naskah kerja sama yang ditindaklanjuti diperoleh dari jumlah dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah dokumen yang diterima. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan review, pembahasan maupun membuat draft/konsep Perjanjian Kerja Sama atau Nota Kesepakatan yang diterima dari unit Eselon II lingkup Ditjen Perikanan Perikanan Budi Daya maupun dari UPT lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak mitra lainnya.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 95 (persen). Pada periode triwulan III capaian IKU ini telah tercapai sebesar 131,58% dari target triwulan III sebesar 70% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 58,29% dari anggaran sebesar Rp.460.655.000,- senilai Rp.268.500.347,-.

Tabel 7. Capaian Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
105,5	127,77	95	70	125	118,48	131,58

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
	89,05	90,26	94,74	100	100	127,77	95	70	125	118,48

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, telah dilakukan beberapa tindaklanjut yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 yaitu:

1. Melakukan rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara DJPB dengan PT. Agrinas Jaladri antara DJPB dengan PT. Agrinas Jaladri pada tanggal 25 Agustus 2025 dan 22 September 2025;
2. Rapat pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara BLUPPB Karawang dengan PT. Bumisraya Nutrisia pada tanggal 11 September 2025;
3. Rapat pembahasan Statement of Intent antara DJPB dengan UNDP pada tanggal 16 September 2025 dan 29 September 2025; dan
4. Audiensi Ditjen Permasalahatan ke DJPB pada tanggal 25 Agustus 2025 dan telah melakukan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama oleh Ditjen Permasalahatan pada tanggal 19 September 2025.

Kendala yang dihadapi pada triwulan III tahun 2025 pada indikator ini yaitu terkait pembahasan terhadap draft perjanjian serta tanggapan/masukan dari mitra kerja sama di lingkup DJPB membutuhkan waktu yang cukup lama.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Diharapkan dapat dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Permasalahatan;
2. Dilakukan penandatanganan Statement of Intent dengan UNDP; dan
3. Dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BLUPPB Karawang dengan PT. Bumisraya Nutrisia.

IKSK.7 Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Rasio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi pemberitaan terkait topik atau isu tertentu dalam periode waktu tertentu. Dengan menyusun rasio ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai

persepsi publik terhadap pemberitaan yang netral dan positif tentang sub sektor perikanan budi daya.

Informasi yang seimbang kepada publik mengenai kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sangat penting untuk mendukung dan mendorong apresiasi masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah di bidang sektor perikanan budi daya.

Rasio pemberitaan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan KKP, kegiatan kehumasan yang dilaksanakan, dirancang dan disusun untuk mewujudkan keterbukaan, itikad baik, kerja sama, dan hubungan yang baik dan bermanfaat antara KKP dan pihak lain dan membantu KKP untuk responsif atas informasi yang beredar guna mewujudkan citra positif KKP. Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budidaya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budidaya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun *online*.

Hasil dari publikasi press release yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online tersebut kemudian dilakukan penghitungan jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya, dengan menggunakan rumus.

1. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung Rasio Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolok ukur yaitu :
 - a. Pemberitaan netral dan positif
 - b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
2. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu:
 - a. Penilaian dilakukan setiap triwulan;
 - b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
 - c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya
3. Cara Pengukuran Capaian :
 - a. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari Biro Humas dan Kerjasama Luar negeri;
 - b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$.

4. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Jumlah Pemberitaan netral dan Positif}(\%) = \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif}}{\text{Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budi daya}} \times 100$$

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan semesteran, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 86 (persen). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan kegiatan Pengelolaan Konten Publikasi Website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 70,78% dari anggaran sebesar Rp.1.840.000.000,- senilai Rp.1.302.300.000,-.

Tabel 8.Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	100	≥ 86				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
					100	100	≥ 86			

Pada periode triwulan III tahun 2025, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan Kegiatan Talkshow With Media
2. Telah dilaksanakan Kegiatan Publikasi melalui pembuatan Video Makan Lele
3. Telah dibuat konten Motion Grafis dan Infografis Perikanan Budi Daya
4. Telah dilaksanakan Kegiatan Podcast Perikanan Budi Daya AKUA
5. Telah dibuat Strategi komunikasi Perikanan Budi Daya
6. Telah dibuat Kerangka Brief Program Unggulan Perikanan Budi Daya
7. Telah dilaksanakan Kegiatan Advertorial Perikanan Budi Daya di Media Online
8. Telah dilaksanakan Kegiatan Ekspose dan Publikasi Program Prioritas Perikanan Budi Daya
9. Telah dilaksanakan pembuatan Film dan Video Perikanan Budi Daya

10. Telah dilaksanakan kegiatan Ekspose dan Publikasi Pameran ILDEX Indonesia The International Livestock, Diary, Meat Processing and Aquaculture Exposition 17 – 19 September 2025
11. Telah dilaksanakan Kegiatan Ekspose dan Publikasi Pameran Indo Fisheries 2025 Expo & Forum TANGGAL 2 – 4 Juli 2025, Grand City Convex Surabaya
12. Shrimp Summit 2025 : Marine and Fisheries Quality Assurance Agency, tanggal 22 - 25 Juni 2025 di Bali.

Sedangkan kendala yang dihadapi indikator ini adalah dukungan data yang belum optimal untuk menghasilkan materi *press release* dalam rangka meningkatkan publikasi program unggulan sub sektor perikanan budi daya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Mengirimkan Surat kepada Unit Kerja Eselon II serta UPT Lingkup DJPB dalam rangka Permintaan Dukungan Data dan Informasi Untuk Keperluan Publikasi meliputi Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB;
2. Melakukan publikasi kegiatan DJPB secara masif dengan melakukan penyebarluasan melalui Siaran Pers, Infografis, Video Perikanan Budidaya, Ekspose Kegiatan di Media Sosial dan Website DJPB;
3. Mengoptimalkan hasil liputan perikanan budi daya sebagai bahan informasi dan publikasi melalui website, media sosial, publikasi online dan cetak; dan
4. Mempromosikan Platform media sosial perikanan budi daya (website, Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok, Youtube) kepada publik pada saat pelaksanaan pameran dan kegiatan yang melibatkan Masyarakat.

IKSK.8 Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran TA. 2025 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2025 (audit) tidak melebihi <0,5%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada

setiap akhir periode, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah <0,5 (persen).

Tabel 9. Capaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	100	<0,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2018-2024							2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
				100	100	100	<0,5			

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 adalah menyampaikan surat Instruksi Dirjen Perikanan Budi Daya atas tindak lanjut dari intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap satker lingkup DJPB.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini yaitu masih terdapat dokumen data dukung tindak lanjut yang tidak sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melengkapi dokumen tindak lanjut sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

IKSK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA,
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan setiap semesteran dan pada semester I target yang ditetapkan adalah sebesar 85 (nilai),

sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 92 (nilai).

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	93,76	92				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024					2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
		95,11	89,07	91,51	86,50	93,76	92			

Hal-hal yang sudah dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja ini yaitu :

1. Melakukan rapat peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan September 2024; dan
2. Menyampaikan Nota Dinas dan Memorandum secara berkala setiap bulan untuk batas waktu pertanggungjawaban UP/TUP, daftar kontrak yang akan berakhir, peningkatan indikator deviasi halaman III DIPA, dan batas waktu pelaporan capaian output.

Terdapat kendala dalam indikator ini yaitu kurang cermatnya penanggungjawab kegiatan di lingkup Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan pada Halaman III DIPA.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dan terus berkomunikasi intensif serta tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pola pencairan anggaran sehingga lebih merata dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Sehingga menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

IKSK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang diukur oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian

Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81,5 (nilai). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Perencanaan dan Anggaran dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 43,01% dari anggaran sebesar Rp.2.550.141.000,- senilai Rp.1.096.793.900,-.

Tabel 11. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	86	81,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
	98,08	71,49		95,23	79,52	92,31	81,5			

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 yaitu monitoring dan evaluasi terhadap satker dalam melakukan input Capaian Output secara berkala.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu perubahan revisi anggaran dampak dari pagu anggaran yang diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Buka blokir anggaran kode 2 RO IISAP senilai Rp83.762.911.000; dan Rekomposisi (pertukaran) blokir anggaran kode A antar eselon I lingkup KKP yaitu Ditjen Perikanan Budi Daya dengan Ditjen Perikanan Tangkap senilai Rp20.834.842.000 tanpa perubahan pagu anggaran masing-masing unit eselon I
2. Pergeseran anggaran antar KRO dan RO dalam 1 (satu) satker dan dalam 1 (satu) program yang sama;
3. Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA, maupun indikator yang membentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang disesuaikan dengan perubahan anggaran;
4. Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu automatic adjustment; dan

- Memastikan input Capaian Output pada aplikasi SAKTI sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya.

IKSK.11 Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (nilai). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Persuratan dengan capaian pada triwulan III sebesar 84,13% dari anggaran sebesar Rp.178.764.000,- senilai Rp.150.388.321,-.

Tabel 12. Capaian Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	99,04	80				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
			84,71	92,37	98,32	99,04	81,5			

Selama periode triwulan III tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu :

- Telah dilakukan identifikasi terhadap hasil pra penilaian pengawasan kearsipan Triwulan III, dengan fokus pada aspek kelemahan dalam instrumen ASKI;

2. Pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPB belum dilaksanakan secara intensif, menimbang penilaian pengawasan kearsipan dibagi menjadi 2 (dua) tahap pada Triwulan II dan Triwulan III; dan
3. Pola pendampingan masih bersifat daring, secara waktu efisien namun kurang adaptif terhadap kondisi masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Sedangkan kendala yang terdapat pada periode triwulan III yaitu :
 1. Perbedaan tingkat kesiapan antar UPT masih cukup signifikan, terutama pada aspek pemahaman instrumen baru dan pengelolaan arsip elektronik serta arsip konvensional;
 2. Perubahan format instrumen ASKI oleh ANRI menimbulkan penyesuaian tambahan dalam pemenuhan data dukung.
 3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik pendamping maupun objek yang memiliki kompetensi teknis spesifik menyebabkan perlunya waktu pendampingan lebih panjang; dan
 4. Keterbatasan waktu pelaksanaan pendampingan tatap muka akibat padatnya agenda kerja DJPB dan efisiensi anggaran.
 Pada triwulan selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu :
 1. Mengintegrasikan hasil penilaian dan tindak lanjut ke dalam perencanaan tahun berikutnya, khususnya dalam hal pembinaan arsip di lingkungan DJPB;
 2. Melaksanakan konsolidasi hasil pendampingan dan evaluasi secara komprehensif terkait pengawasan kearsipan yang dikemas dalam bentuk laporan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan;
 3. Melakukan koordinasi lintas unit dengan Biro Umum untuk memastikan hasil pengawasan internal mampu selaras dengan standar ANRI;
 4. Asistensi pada objek dengan kategori nilai rendah pada hasil pengawasan kearsipan dilaksanakan secara luring.

IKSK.12 Persentase Layanan Perkantoran

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, serta layanan terkait Barang Milik Negara.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Penatausahaan Rumah Tangga dan Layanan BMN dengan capaian pada triwulan III sebesar 58,63% dari anggaran sebesar Rp.437.918.000,- senilai Rp.256.772.498,-.

Tabel 13. Capaian Persentase Layanan Perkantoran

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	100	80				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Layanan Perkantoran								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
				100	100	100	80			

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama periode triwulan III tahun 2025 untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu :

1. Telah dilaksanakan kegiatan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan serta layanan operasional Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional; dan
2. Sudah dilakukan Hibah BMN, Penghapusan BMN , Pemanfaatan BMN (sewa) dan Pengelolaan Rumah Negara.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini pada periode triwulan III adalah kegiatan rapat serta jadwal pemeliharaan kendaraan masih tidak sesuai timeline dan pelaksanaan penghapusan aset KJA offshore belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta Pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan; dan
2. Melakukan inventarisasi aset yang akan di hapuskan dan dimanfaatkan (sewa) yang ada di UPT lingkup DJPB.

IKSK.13 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 95 (persen). Pada periode triwulan III indikator ini telah tercapai sebesar 125% dari target triwulan III sebesar 70% yang berarti telah memenuhi target, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Kerja Sama Bidang Perikanan Budi Daya dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 58,29% dari anggaran sebesar Rp.460.655.000,- senilai Rp.268.500.347,-.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti pada periode pengukuran sampai dengan triwulan III IKU ini telah mencapai 97,91% dari target yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 85 (persen) yang artinya sudah mencapai target walaupun hasil dari jumlah tindak lanjut belum sepenuhnya tuntas. Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Pengelolaan Keuangan dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 26,11% dari anggaran sebesar Rp.103.691.000,- senilai Rp.70.291.665,-.

Data Rekapitulasi Capaian IKU
“Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	71	71	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	200	163	81,50%	37	18,50%
3	Ditjen PRL	21	21	100,00%	0	0,00%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	172	164	95,35%	8	4,65%
4	Ditjen PSDKP	20	20	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	335	328	97,91%	7	2,09%
6	BPPSDMKP	321	292	90,97%	29	9,03%
7	Ditjen PDSPKP	110	97	88,18%	13	11,82%
8	BPPMHKP	146	142	97,26%	4	2,74%
9	Itjen	15	15	100,00%	0	0,00%
TOTAL		1411	1313	93,05%	98	6,95%

Gambar 8. Perbandingan Capaian Indikator Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP

Dari perbandingan gambar di atas didapat bahwa, capaian nilai presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar 97,91%, dimana hasil tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan eselon I lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Inspektorat Jenderal. Hal ini disebabkan karena dari jumlah total rekomendasi sebanyak 335, hanya 328 saja yang baru ditindaklanjuti, sehingga masih tersisa sebanyak 7 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau sebesar 2,09%.

Tabel 14. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya								
2024		2025			% Capaian					
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian					
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025				
80,95	93,94	85	85	97,91	115,19	115,19				
		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya								
Realisasi 2018-2024				2025						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW II
-	74,32	70,41	67,21	89,86	89,15	93,94	85	85	97,91	115,19

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada sepanjang periode triwulan III tahun 2025 terhadap indikator kinerja ini yaitu menyampaikan surat Instruksi Dirjen Perikanan Budi Daya atas tindak lanjut dari intruksi Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap satker lingkup DJPB. Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada periode triwulan III Tahun 2025 adalah beberapa dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan rekomendasi.

Lebih lanjut, upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Selalu adaptif dan responsif dengan perubahan kebijakan dengan koordinasi dengan unit kerja di atasnya atau yang terkait; dan
3. melakukan monitoring rutin tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan mengingatkan operator Satker untuk mengupload dokumen tindak lanjut yang sesuai sebelum berakhirnya waktu perhitungan capaian IKU.

IKSK.14 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan

pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 3,5 (nilai).

Tabel 15. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	3,57	3,5				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
-	-	-	-	-	-	3,57	3,5			

Selama periode triwulan III tahun 2025, kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu sudah disampaikan SK TIM ASESOR Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan sedang dilakukan penjaminan kualitas oleh inspektorat mitra terait dengan penilaian mandiri.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu masih adanya pencapaian tujuan yang belum terinput dalam kertas kerja KK Lead III.

Sehingga rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu meningkatkan nilai Maturitas yang telah diperoleh dan berkoordinasi dengan Inspektorat Mitra, Biro Keuangan & Biro Perencanaan terhadap penilaian Maturitas selanjutnya.

IKSK.15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2025, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada

kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya.

Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan; dan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 81 (persen).

Tabel 16. Capaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	82,56	81				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya								
		Realisasi 2018-2024						2025		
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III
						82,56	81			

Walaupun belum capaian kinerja pada periode triwulan III ini, namun ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung Indikator kinerja ini yaitu membuat rekapitulasi bantuan pemerintah lingkup DJPB sampai dengan Triwulan III Tahun 2025.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah beberapa data yang diberikan tidak tepat waktu dan untuk penginputan pada Aplikasi Bantuan Pemerintah masih terdapat kendala pada saat memvalidasi data KUSUKA pembudidaya yang belum terdaftar, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk diproses.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan satker UPT dan Pusat agar data yang diberikan tepat waktu dan data yang sudah diberikan sebelumnya untuk dilengkapi kekurangannya.

IKSK.16 Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Pembangunan integritas adalah proses membangun dan memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran dalam diri individu, kelompok, atau organisasi. Hal ini mencakup pengembangan karakter yang konsisten dengan prinsip-prinsip kebenaran, tanggung jawab, dan keadilan, serta penerapannya dalam tindakan sehari-hari.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan terkait pembangunan integritas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah memperkuat integritas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Peraturan ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di KKP untuk menerapkan langkah-langkah konkret dalam mencegah praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi.

Indikator Kinerja Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diukur melalui 6 (enam) indikator penilaian yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas;
2. Pengendalian Gratifikasi;
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS;
4. Pengelolaan Konflik Kepentingan;
5. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan
6. Pengendalian Kecurangan.

Masing-masing indikator penilaian tersebut terdiri dari sub indikator penilaian yang menggambarkan proses atau kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator utama. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang terpenuhi dari masing-masing sub indikator penilaian.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (nilai). Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 17. Capaian Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
		76				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Mengikuti Sosialisasi pengelolaan konflik kepentingan dan rencana pemantauan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya dan BPPSDMKP oleh Inspektur III, Itjen KKP melalui Surat Dinas Nomor B.425/ITJ.330/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 ;

2. Telah dilakukan Penyampaian Dokumen Identifikasi dan Manajemen Risiko serta Profiling Konflik Kepentingan kepada Inspektur IV, Itjen KKP melalui Nota Dinas Nomor 2501/DJPB.1/OT.710/IX/2025 tanggal 26 September 2025;
3. Telah dibuat Laporan hasil monev pengelolaan konflik kepentingan melalui surat dinas Nomor B.6166/DJPB.1/OT.710/IX/2025 tanggal 26 September 2025; dan
4. Telah dilakukan Pengisian Survei Pemahaman Pengelolaan Konflik Kepentingan melalui Nota Dinas Nomor 2333/DJPB.1/HP.550/IX/2025 tanggal 5 September 2025.

Belum ditemukan kendala dalam pencapaian IKU ini pada periode triwulan III tahun 2025. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memastikan pemenuhan data dukung disusun tepat waktu dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan dokumen data dukung.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Ditjen Perikanan Budi Daya adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di Ditjen Perikanan Budi Daya sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai TKPD merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner satu data dan diinput ke dalam aplikasi satu data setiap bulannya kemudian di validasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator Pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh (0-25%), cukup patuh (26-50%), patuh (51-75%), dan sangat patuh (76-100%). Parameternya ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

1. Persentase jumlah pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30%;
2. Persentase data produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%; dan
3. Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Analisis, Verifikasi, Validasi dan Supervisi Data Perikanan Budidaya dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 66,62% dari anggaran sebesar Rp.1.292.203.000,- senilai Rp.860.912.600,-.

Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
	100	75				

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2018-2024						2025			
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	% Capaian terhadap TW III	
						100	75				

Hal-hal yang telah dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 untuk mendukung pencapaian IKU ini yaitu :

1. Evaluasi kinerja enumerator bisa dilanjutkan di triwulan IV seiring dengan semakin membaiknya kinerja enumerator berdasarkan hasil pengumpulan data triwulan II;
2. Biaya operasional enumerator semester I sudah dicairkan dengan beberapa kendala pada proses transfer seperti no rekening yang tidak aktif; dan
3. Percepatan Kusuka sudah dilakukan di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, hasil yang dicapai cukup baik masing masing provinsi bisa mencapai penambahan lebih dari 1000 org dalam jangka waktu satu minggu.

Adapun kendala yang muncul pada triwulan II ini, yaitu:

1. Karena keterbatasan anggaran dan luasnya *coberage* pengumpulan data evaluasi hanya dilakukan secara *online* sehingga tidak maksimal, mengingat masih banyak wilayah di Indonesia yang kondisi infrastrukturnya kurang baik;
2. Pelaksanaan percepatan pendataan KUSUKA terkendala dengan *coverage* lokasi yang luas dan waktu yang terbatas sehingga maksimal data kusuka yang terkumpul tidak lebih dari 2.000 kusuka per kabupatennya; dan
3. Dalam melakukan proses pembayaran adalah proses verifikasi data yang dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengiriman biaya operasional kepada enumerator.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya diantaranya yakni:

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan data KUSUKA dan data produksi untuk mengoptimalkan kinerja enumerator;

2. Berkoordinasi dengan PUSDATIN selaku walidata untuk mencari solusi dari permasalahan permasalahan dalam pengumpulan data di lapangan maupun kendala yang dihadapi dalam aplikasi satudata; dan
3. Melakukan sosialisai metode validasi nasional dengan menggunakan aplikasi yang lebih baru dan lebih mutakhir agar data tahun 2025 bisa lebih cepat publikasinya

IKSK.18 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Indikator ini mengukur tingkat keterbukaan dan kepatuhan Ditjen Perikanan Budi Daya dalam perencanaan pengadaan barang/jasa melalui publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada platform Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta [PERPRES No. 12 Tahun 2021](#) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP secara lengkap dan tepat waktu menjadi fondasi dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengadaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya.

Adapun perhitungan capaian IKU ini adalah Persentase Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibanding Pagu Pengadaan Barang/Jasa. Jika RUP yang diumumkan melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (persen). Pada periode triwulan III capaian IKU ini telah mencapai sebesar 131,5% dari target triwulan III sebesar 76% yang berarti telah memenuhi target.

Tabel 19. Capaian Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
		76	76	100	131,5	131,5

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan III tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah melakukan kegiatan penyusunan RUP SIRUP lingkup DJPB dan monitoring penginputan RUP pada SIRUP.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan perubahan RUP dan operator SIRUP baru yang perlu sosialisasi lebih lanjut karena belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis penginputan RUP di SIRUP, seperti pengelompokan jenis pengadaan, pemilihan metode pemilihan, dan estimasi nilai paket yang perlu sosialisasi lebih lanjut.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan monitoring penginputan RUP triwulan IV pada SIRUP, mengadakan kegiatan penyusunan RUP pada SIRUP triwulan IV lingkup DJPB dan melakukan pembinaan pada operator SIRUP.

IKSK.19 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Proses bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk mengatur dan mengoptimalkan proses bisnis di lingkungan KKP agar lebih efisien, efektif, dan terintegrasi.

Proses Bisnis Kementerian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri atas proses inti, proses pendukung dan proses lainnya. Proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti, namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal;
2. Proses Bisnis level 1 dan level 2. Proses Bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 0, sedangkan Proses Bisnis level 2 merupakan penjabaran lebih rinci dari Proses Bisnis level 1 (proses inti dan proses pendukung). Proses Bisnis level 1 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon I dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya sedangkan Proses Bisnis level 2 menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh Unit Organisasi eselon II; dan
3. Proses Bisnis level 3 merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada pada Proses Bisnis level 1 (proses lainnya) dan level 2. Proses Bisnis ini menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen). Untuk dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi lingkup DJPB dengan capaian pada triwulan III yakni sebesar 69,99% dari anggaran sebesar Rp.206.855.000,- senilai Rp.144.777.667,-.

Tabel 20. Capaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
		65				

Dalam mendukung capaian IKU ini pada periode triwulan III tahun 2025, kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Telah dilaksanakan Penyusunan Proses Bisnis Level 3 Cross Fungsional Map (CFM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui Surat Dinas Nomor 4694/DJPB.1/OT.210/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025; dan
2. Telah dilaksanakan rapat Pembahasan Proses Bisnis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melalui Surat Undangan Nomor 5356/DJPB.1/TU.330/IX/2025 tanggal 1 September 2025.

Ruang lingkup kegiatan pengelolaan perikanan budi daya yang harus dituangkan dalam peta proses bisnis harus didasarkan pada mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TUSI DJPB yang dilaksanakan saat ini dan memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kegiatan yang dilakukan di pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pembahasan mendetail dan bertahap.

Untuk rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pembahasan kembali terhadap draft peta proses bisnis DJPB yang telah disusun menyesuaikan dengan SOTK DJPB saat ini.

IKSK.20 Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut dapat berpedoman pada PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan adanya kebijakan inovasi pelayanan publik adalah untuk : (i) Mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik; (ii) Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik; (iii) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (iv) Meningkatkan kepuasan masyarakat. Sebuah inovasi dapat berupa : (i) penggabungan unsur-unsur baru; (ii) kombinasi baru dari unsur yang ada; (iii) perubahan signifikan atau berawal dari cara tradisional dalam melakukan sesuatu; dan (iv) mengacu pada produk baru, kebijakan dan program baru, pendekatan baru, dan

proses baru. Jadi, Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Jenis Inovasi Pelayanan Publik yang dapat diikutsertakan berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara kontak langsung antara pemberi dan pengguna layanan. Dan pelayanan tidak langsung, yaitu upaya pembaharuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Pelayanan Publik harus memenuhi kriteria adanya perbaikan pelayanan, memberikan manfaat bagi perbaikan sistem dan masyarakat, berjalan lebih dari 1 tahun, dapat direplikasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah 77 (nilai).

Tabel 21. Capaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya						
Indikator Kinerja		Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
		77				

Kegiatan yang dilakukan pada periode triwulan II tahun 2025 untuk mendukung pencapaian IKU ini telah dilakukan rapat pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik lingkup KKP pada tanggal 26-27 Mei 2025 di Jakarta dengan hasil Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 Nomor B.474/SJ/TU.220/V/2025 Tanggal 27 Mei 2025. Berita Acara ini disampaikan oleh Kapusdatin Setjen KKP melalui Nota Dinas Nomor 1689/SJ.8/TU.210/VI/2025 Tanggal 4 Juni 2025.

Tidak ada kendala signifikan dalam pencapaian target IKU ini di triwulan III tahun 2025.

IKSK.21 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Perhitungan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai) dihitung dalam kurun periode 1 (satu) tahun, dinilai oleh Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Setjen KKP. Cara mengukur capaian tersebut dengan berdasarkan bobot penilaian monev terdiri atas pengisian SAQ PPID dan Presentasi. Indikator dan bobot SAQ PPID diantaranya mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Media Publikasi baik melalui konten video dan konten infografis yang dipublish di media sosial dan website Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Publikasi tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat terkait layanan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Tim PPID Sekretariat Perikanan Budi Daya dengan capaian kategori informatif.

Pada periode triwulan III ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 untuk indikator kegiatan ini adalah ≥ 80 (nilai).

Tabel 22. Capaian Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran Strategis		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya				
Indikator Kinerja		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik				
2024		2025			% Capaian	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian	
TW III	Tahun 2024	Tahunan	TW III	TW III	terhadap target TW III 2025	terhadap target Tahun 2025
		≥ 80				

Pada periode triwulan III tahun 2025 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator ini antara lain :

1. Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengisian data dukung keterbukaan informasi publik di aplikasi PELIKAN serta pengusulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) lingkup Pusat dan UPT DJPB; dan
2. Saat ini telah diunggah Self Assesment Questionnaire (SAQ) pada aplikasi PELIKAN dan sedang dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Biro Humas Sekjen KKP.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu terdapat kesulitan pada saat pengisian Final Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui kuesioner dan unggah data dukung di Aplikasi PELIKAN dengan seluruh UPT DJPB. Diharapkan untuk semua UPT dengan adanya Aplikasi PELIKAN mendapatkan nilai capaian IKU sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 80.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp.82.989.372.000,- dan telah terealisasi Rp.17.657.401.574,- atau sebesar 21,28% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan persentase realisasi belanja sebesar 1,59% dari capaian Triwulan III tahun 2024 sebesar 22,87%.

OM-SPAN

halchat

SETDITJEN PERIK...

T.A. 2025

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

X

EXCEL

P

PDF

T

FILTER

FILTER: KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

PERIODE | JULI S.D. SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	42,444,859,000	39,444,513,000	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	82,989,372,000	
		REALISASI	9,269,208,932 (21.84%)	8,388,192,642 (21.27%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,657,401,574 (21.28%)	
		SISA	33,175,650,068	31,056,320,358	1,100,000,000	0	0	0	0	0	0	65,331,970,426	
GRAND TOTAL		PAGU	42,444,859,000	39,444,513,000	0	0	0	0	0	0	82,989,372,000		
		REALISASI	9,269,208,932 (21.84%)	8,388,192,642 (21.27%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	17,657,401,574 (21.28%)		
		SISA	33,175,650,068	31,056,320,358	1,100,000,000	0	0	0	0	0	65,331,970,426		

Gambar 9. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2025

OM-SPAN

halchat

SETDITJEN PERIK...
T.A. 2024

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER: KODE KEGIATAN | 2348 | DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

PERIODE | JULI S.D. SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL	
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER			
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	41,004,842,000	60,610,581,000	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	103,365,423,000	
		REALISASI	8,796,737,734 (21.45%)	14,519,738,561 (23.96%)	322,136,520 (18.41%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0	23,638,612,815 (22.87%)	
		SISA	32,208,104,266	46,090,842,439	1,427,863,480	0	0	0	0	0	0	0	79,726,810,185	
GRAND TOTAL			PAGU	41,004,842,000	60,610,581,000	0	0	0	0	0	0	0	103,365,423,000	
			REALISASI	8,796,737,734 (21.45%)	14,519,738,561 (23.96%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0	23,638,612,815 (22.87%)	
			SISA	32,208,104,266	46,090,842,439	0	0	0	0	0	0	0	79,726,810,185	

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025 adalah sebesar Rp. 82.989.372.000,- dan telah terealisasi Rp. 17.657.401.574,- atau sebesar 21,28% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan).
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik) yakni sebesar 118,40 (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerjaku KKP). Dari hasil evaluasi capaian kinerja triwulan III tahun 2025, hanya 3 Indikator Kinerja Utama yang dapat diukur capaian kinerjanya dan telah mencapai target yang ditetapkan, sedangkan sisanya 18 Indikator Kinerja Utama akan dihitung pencapaiannya setiap semesteran dan tahunan.

Secara keseluruhan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III tahun 2025 adalah Istimewa (sangat baik), hal ini terlihat dari capaian pada 3 indikator kinerja untuk triwulan III sudah mencapai atau melebihi dari target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 dengan nilai pencapaian NPSS sebesar 118,40. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum ada capaiannya untuk tetap bekerja keras dan terus berupaya melakukan perbaikan agar dapat mencapai/melebihi target yang ditetapkan pada perhitungan periode yang sudah ditetapkan yaitu semesteran atau tahunan.

4.2 Rekomendasi

Untuk peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja internal Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terhadap capaian kinerja secara berkala; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik triwulanan, semesteran dan tahunan.

LAMPIRAN

Lampiran I	: 1-4
Hal	: Perjanjian Kinerja Awal



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1.	Nilai SAKIP DJPB (nilai)	84
		2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	85
		3.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	<0,5
		4.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	81
		5.	Nilai Pembangunan Integritas Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	81,5
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,5
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	81
		10.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen Perikanan Budi Daya (persen)	75
		11.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
		12.	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	80
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Ditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	65
		15.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	77

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		16.	Persentase Dokumen/Naskah Kerja Sama yang Ditindaklanjuti (Persen)	95
		17.	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional (Indeks)	77
		18.	Indeksi Pengelolaan SDM (Indeks)	3
		19.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya (Persen)	≥86
		20.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	≥80
		21.	Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	526.244.516.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025		526.244.516.000

Jakarta, 10 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya



Gemi Triastutik

